

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Secara Geografis

a. Letak dan Batas Wilayah

Desa Batakan adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, dengan sebagian daerahnya merupakan daerah rawa dan pantai/pesisir.

Adapun batas-batas Desa Batakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Dewa
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kandangan Lama
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa

b. Jarak Desa

Jarak desa dengan Kecamatan Panyipatan kurang lebih 25 KM, dengan ibu kota kabupaten Tanah Laut berjarak 40 KM, sedangkan dengan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan berjarak 120 KM.

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Batakan Kecamatan Panyipatan adalah 26.006 ha. Daerahnya terdiri dari pantai/pesisir, dataran tinggi/pegunungan, lereng gunung, rawa-rawa, persawahan, perkebunan dan pemukiman penduduk.

d. Iklim

Iklim desa Batakan rata-rata perhari mencapai 26 derajat celsius dengan curah hujan 2.500 m dan Batakan juga memiliki dua musim tetap yaitu musimkemarau dan musim penghujan.

e. Sarana dan prasarana Desa

Pemerintah desa Batakan terbagi menjadi 21 RT dan 7 RW dengan sarana dan prasarana pemerintah terdiri dari 1 buah kantor kepala desa dan kantor PKK.

Sarana penunjang lain yang ada di desa Batajan yaitu 1 buah Puskesmas, 1 buah Puskesmas pembantu dan 3 buah posyandu. Adapun prasarana angkutan di desa Batakan melalui darat dan sungai.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan, maka diperoleh data identitas informan yang diuraikan seperti berikut:

Informan 1

Nama : Arsani
 Umur : 46
 Alamat : Jl Pahlawan RT 01
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Kepala Desa

Informan 1 Kepala Desa Batakan, menunjukkan Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Batakan adalah sebesar Rp 1,207,399,186.00,

dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa diperuntukkan pembangunan desa dengan jenis kegiatan yakni, penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan desa siaga, perkerasan jalan menuju makam RT 13, perkerasan jalan usaha tani, dan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah desa.

Dengan adanya pembangunan tersebut bisa membantu masyarakat untuk mempermudah, misalnya seperti pembangunan jalan usaha tani, banyak masyarakat yang menggunakan untuk pergi ke lahan-lahan pertanian dan perkebunan mereka. Dimana dulu jalan tersebut yang sangat sulit untuk dilalui dan sekarang jadi lebih baik.

Kepala Desa Batakan pastinya berharap agar desa ini dapat menjadi maju dengan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai untuk membantu masyarakat. Diadakannya pembangunan-pembangunan yang setiap tahunnya perencanaan berbeda-beda agar tercapai semua untuk kepentingan masyarakat.

Informan 2

Nama : Muhammad Ansari

Umur : 28

Alamat : Jl Pahlawan RT 10

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Desa

Informan 2 mengatakan bahwa dana desa ini digunakan untuk bidang pemberdayaan seperti mengadakan pelatihan, pembangunan seperti membangun posyandu dan pengadaan sarana dan prasarana lainnya yg sudah dikatakan oleh informan 1 diatas. Untuk pembangunan itu sendiri sudah terlaksana semua di tahun ini, dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban yang berjalan lancar.

Pengelolaan keuangan ini sendiri sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, dalam perencanaan pembangunan ini juga dilakukan musrembang Desa dengan beberapa perwakilan desa, namun demikian ada sebagian dari masyarakat yang juga tidak mengetahui. Untuk dana desa kami juga memperlihatkan secara terbuka kepada masyarakat berapa jumlah yang dikeluarkan untuk biaya pembangunan itu sendiri.

Informan 3

Nama : Muhammad Padlan
Umur : 29
Alamat : Jl Pahlawan RT 5
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Staff Keuangan

Informan 3 mengatakan bahwa proses pencairan dana desa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu hal yang pertama membuat rancangan pendapatn dan belanja dan pemerintah desa juga membuat program rencana pembangunan yang akan dijalankan dengan menggunakan

dana desa. Kemudian hasil rancangan diusulkan ke tingkat kecamatan. Tahapan terakhir setelah diusulkan ke kecamatan dana desa langsung di transfer melalui rekening desa.

Untuk tata kelola atau penggunaan keuangan dana desa yang diterima sudah diatur di dalam Peraturan Bupati. Jadi dalam penggunaan dana desa tersebut harus mengacu kepada Peraturan Bupati dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang terdapat di dalam Peraturan Bupati tersebut.

Informan 4

Nama : Isra
Umur : 28
Alamat : Jl Taluk Pulantan RT 13
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua Dusun

Isra sudah menjabat sebagai dusun di pemerintahan Desa Batakan selama 4 tahun, menurut saya pembangunan di desa Batakan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintahan. Pada proses rencana pembangunan dana desa juga melibatkan musrembang kepada beberapa perwakilan masyarakat seperti RT di desa ini guna untuk musyawarah pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemabngunan.

Dengan adanya musyawarah ini diharapkan akan mampu memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Dari perencanaan ini

juga tentu akan dipilih kembali masukan-masukan terhadap perencanaan pembangunan dan tentu akan di setujui oleh seluruh para aparatur desa.

Informan 5

Nama : Asmana
Umur : 29
Alamat : Jl Mustafa Ideham RT 20
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Anggota BPD

Asmana salah satu perwakilan dari BPD Desa Batakan mengatakan bahwa pembangunan di desa batakan sudah terlaksana dengan baik, dalam tahapan pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan kurang efektif dikarenakan tidak adanya evaluasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah ada permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut atau tidak. Meskipun proses pelaporan pertanggung jawaban itu sendiri dilakukan oleh para aparatur pemerintah desa, tidak adanya orang ke tiga ataupun orang lain dalam penyusunan pelaporan pertanggung jawaban.

Informan 6

Nama : Muhdi
Umur : 47
Alamat : Jl Taluk Pulantan RT 12

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua RT

Sebagai ketua RT saya merasa sangat senang dengan adanya pembangunan desa ini yang sangat membantu kepada masyarakat. Namun dalam tahapan perencanaan pemerintah desa tidak melaksanakan musrembang kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat memberikan aspirasinya kepada pemerintah desa.

Harapan nya dalam pembangunan ini adanya keterbukaan antara masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat juga ikut berpartisipasi, oleh karena dalam tahapan perencanaan masyarakat tidak diikutsertakan hanya saja dari beberapa sehingga masyarakat juga banyak yg tidak berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

B. Analisis Data

1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dana Desa merupakan perolehan bagian dari keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Pengelolaan keuangan Dana Desa dalam pelaksana pembangunan di Desa Batakan merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban .

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

a. Perencanaan keuangan Dana Desa

Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan dana desa di desa Batakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pemerintahan desa yang dimana diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Sehingga rencana-rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan seluruh masyarakat.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, namun nyata nya kegiatan musrembang ini hanya diikuti oleh beberapa perwakilan masyarakat saja. Musrembang tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi. Akan tetapi dari hasil penelitian ini bahwa kegiatan musrembang dalam

tahapan perencanaan ini masih sebatas pada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang Desa.

Dari penjelasan diatas bahwa pada akhirnya rencana kegiatan dana desa yang tertuang dalam DURK dapat selesai dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat banyak maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan keuangan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Batakan masih kurang baik, meskipun pembangunan yang ada sekarang sudah membantu sebagian masyarakat.

b. Pelaksanaan keuangan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan peraturan. Adapun terkait pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Penggunaan Anggaran Dana Desa

Bidang kegiatan	Jenis kegiatan	Anggaran (Rp)
Pembangunan Desa	Penyelenggaraan posyandu	155,137,000.00
	Penyelenggaraan desa siaga	71,860,000.00
	Pekerasan jalan menuju makam	28,075,000.00
	Perkerasan jalan	201,571,000.00

	usaha tani	
	Pengadaan sarana dan prasarana sampah desa	45,000,000.00
	Total	501,643,000.00

Sumber: Diolah dari kantor Desa Batakan

Informasi yang diperoleh dari beberapa informan terkait dengan tahapan pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan dana desa di desa Batakan bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan pengelolaan dana desa masih sangat rendah, baik dalam tenaga maupun materi dalam mendukung proses pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Maksudnya yaitu kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi seperti musrembang yang hanya dihadiri oleh beberapa orang perwakilan saja. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa.

c. Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa

Tahapan penyelesaian pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam pelaksanaan pemabngunan di desa Batakan

kecamatan panyipatan dalam tahapan pertanggungjawaban ini kurang efektif. Dalam hal penyusunan laporan pertanggung jawaban ini di susun dan diselesaikan oleh pemerintah desa Batakan itu sendiri, bukan dari pihak ketiga ataupun orang lain, namun tidak adanya transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggung jawab mereka dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa.

Dalam pengelolaan keuangan dana desa ini bahwa kegiatan harus dievaluasi bersama dengan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa dalam tahapan pertanggung jawaban hendaknya pemerintah desa tidak hanya melakukan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat saja melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang sudah terlaksana di desa Batakan.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Desa

a. Ekonomi Islam Bersifat *Rabbaniyah*

Pertama, ekonomi islam adalah ekonomi Rabbaniyah (ketuhanan), karena titiknya dari Allah, dengan tujuan mencari ridha Allah dan caranya yang tidak bertentangan dengan syariat Allah.

Kedua, ekonomi dalam pandangan islam bukanlah tujuan, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim

agar bisa bekerja untuk mencapai suatu tujuannya (Irfan, 2016, h. 126)

Ketiga, sifat ekonomi islam yang Rabbani adalah pengawasan internal atau hati nurani yang ditumbuhkan oleh imam di dalam hati seseorang muslim dan menjadikan pengawas dirinya. Keempat, adanya konsep perwakilan dalam harta Allah SWT.

Dari penjelasan ekonomi Rabbaniyah di atas pada pengelolaan alokasi dana desa jika dilihat dari tahapan perencanaan yaitu Musrembang Desa yang hanya dihadiri oleh beberapa perwakilan saja, yang harapan warga seharusnya diberitahukan semua kepada masyarakat, dan dari warga yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa itu adanya kecurangan dalam dana, padahal dalam wawancara bersama bapak sekretaris desa beliau mengatakan adanya keterbukaan biaya pembangunan tersebut. Dan di dalam tahap pelaksanaan pembangunan, tidak ada sama sekali partisipasi warga dalam pembuatan pembangunan dan di tahap pertanggungjawaban penyusunan laporan pertanggung jawaban disusun oleh pemerintah desa bataan.

Bagi seorang muslim saling mengawasi didalam kegiatan ekonomi maupun pembangunan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus mengikuti peraturan, dalam masalah Musyawarah perencanaan maupun pertanggung jawaban

mengalokasikan Harta/dana, karena dalam pembangunan ekonomi islam ada yang namanya Rabbaniyah (ketuhanan) untuk menjaga agar kita tetap tawakal, dan tetap menjaga dari tujuannya yaitu mencari ridha Allah, jadi jangan menuduh kalau kita sendiri tidak ikut serta dalam pengelolaan anggaran.

2. Tujuan Alokasi Dana dalam Ekonomi Islam

Pengelolaan alokasi dana desa yang berjalan di Desa Batakan sering terjadi kesalahpahaman antara warga dan pemerintah desa, warga yang mengatakan bahwa pemerintah desa tidak memberi informasi yang lengkap sehingga kurang terjadinya interaksi antar warga dan pemerintah desa dan pemerintah desa mengatakan bahwa dalam tahapan pembangunan masyarakat tidak satupun yang datang, sedangkan tujuan dari alokasi dana menurut ekonomi Islam itu untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah, jadikan setiap pekerjaan sebagai kecenderungan jiwa terhadap kecintaan pada Allah agar apa yang kita lakukan dalam pengelolaan dana tidak hanya untuk dunia tetapi lebih diutamakan akhirnya atau akhiratnya nanti.

3. Prinsip Pembangunan Ekonomi Islam

Pada uraian terdahulu telah dipaparkan bahwa ekonomi pembangunan modern telah mengalami fase-fase perkembanganyang cukup signifikan. Walaupun fase-fase

tersebut dilalui dengan cukup lama, namun tidak memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dunia yang sejahtera dan adil. Ketika Islam menawarkan konsep pembangunannya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, maka alasan pertama munculnya konsep ekonomi pembangunan ini adalah didasari adanya kebutuhan akan suatu konsep alternatif yang layak diterapkan bagi pembangunan negara-negara Muslim. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa konsep pembangunan ekonomi model Barat yang selama ini diterapkan hampir dua abad di hampir seluruh negara-negara dunia ternyata tidak cocok dengan jiwa dan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara-negara Muslim. Itu terlihat pada realita pembangunan ekonomi negara-negara berkembang.

Maka tidak aneh, jika banyak kritik yang menyatakan bahwa konsep pembangunan Barat yang lahir dari teori kapitalis malah bisa merusak masa depan pembangunan negara-negara muslim tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam adalah :

- a. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial

spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.akhirat

- b. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.
- c. Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multi dimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
- d. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumberdaya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu, pemanfaatan sumberdaya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.

Dari keterangan wawancara dari beberapa responden dan penjelasan Ekonomi pembangunan Islam di atas dapat di jelaskan

bahwa Pengelolaan Alokasi Desa tidak hanya di pandang dalam masalah bangunannya saja tetapi dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban sangat penting kaerena dalam Ekonomi Pembangunan Islam terdapat prinsip-prinsip pembangunan ekonomi Islam harus diperhatikan, kita sebagai seorang manusia harus menjaga sikap bermusyawarah, di dalam Islam bermusyawarah sangat penting agar di dalam perencanaan Musrembang mendapat hasil yang sempurna dan tidak menimbulkan hasrat di diri bahwa yang dilakukan tim pelaksana itu salah dan tidak berfikir bahwa mereka menggelapkan uang anggaran yang keluar setiap tahunnya, agar itu tidak terjadi ke ikut sertaan dalam Musrembang Desa dalam perencanaan pembangunan itu dihadiri. Begitu juga di dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat seharusnya ikut serta dalam pelaksanaan agar yang didapat tidak hanya kesejahteraan didunia tetapi juga di akhirat, dan pertanggung jawaban alokasi dana desa, Islam mengajarkakita ikut serta dalam hal kebaikan agar tidak ada fikiran yang buruk membayangi seseorang, tanggung jawab adalah suatu hal yang berat tanggungjawabnya bagi seseorang tetapi dalam hal ini masyarakat Desa Batakan harus sama-sama menjaga apa yang telah diberi pemerintah karena itu merupakan amanah.

